

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dengan banyak populasi 269 pedagang, kemudian dengan rumus yamanane dengan sampling eror sebesar 5% peneliti mendapat sampel sebesar 35 oraang responden yang akan disebar dalam penelitan ini. Sebelum menyebar peneliti mengkaji instrumen tes normalitas, validitas, reliabilitas, uji regresi serta hasil hipotesis awal. Peneliti menggunakan teknik reliabilitas dengan menggunakan hasil pengujian terhadap setiap variabel dan bila pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain reability menunjukan konsisten, untuk menguji reliabilitas peneliti menggunakan program *SPSS 25* dengan analisis statistik *crounbch alpha*.

Pengambilan data dilaksanakan dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 15 buah pertanyaan untuk variabel X Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi dan 15 buah pertanyaan untuk variabel Y Penertiban Pedaganag kepada 35 pedagang yang dijadikan responden sampel, dimana masing-masing jawaban mengacu pada skala Likert sebagai berikut: untuk jawaban “SS” (Sangat Setuju) nilainya 5, untuk jawaban “S” (Setuju) nilainya 4, untuk “RG” (Ragu-Ragu) nilainaya 3, untuk “KS” (Kurang Setuju) nilainya 2, untuk “TS” (Tidak Setuju) nilainya 1. Penelitian ini mengguankan signifikasi 0,05 sehingga syarat minimum suatu instrumen untuk dianggap valid adalah jika tingkat signifikasi dari $r_{hitung} < 0,05$ atau $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka kuisioner tersebut dapat dikatakan valid atau reliabel.

Hasil perhitungan melalui *SPSS* versi 25 seperti pada Bab IV, dapat diketahui bahwa nilai perhitungan variabel X dan Y $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $5,193 > 2,035$, hal ini menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang tinggi dan kuat, hal tersebut menunjukkan bahwa variabel X dan Y berhubungan. Analisis dapat disimpulkan hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya terdapat pengaruh antar implementasi kebijakan rejo anguripi terhadap penertiban pedagang di Kota Mojokerto.

5.2 Saran

Sebagai upaya memberikan masukan dalam rangka mengoptimalkan Pengaruh Implementasi Kebijakan Rejo Anguripi Terhadap Penertiban Pedagang Pasar di Kota Mojokerto, maka berdasarkan hasil penelitian peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk lebih meningkatkan pengaruh implementasi kebijakan dalam penertiban retribusi pasar perlu adanya evaluasi terkait rejo anguripi untuk lebih meningkatkan angka pengaruh implementasi kebijakan kebijakan rejo anguripi terhadap penertiban pedaganag pasar tanjung anyar.
- b. UPTD pasar sebagai pelaksana teknis implementasi Rejo Anguripi, UPTD pasar harus mampu untuk lebih meningkatkan komunikasi antara UPTD pasar dengan pedaganag pasar. Dan perlu mendengarkan saran-saran dari para pedagang atau melakukan evaluasi kinerja rejo anguripi.
- c. Penelitian ini diharapkan agar sekiranya dapat dilihat dari sisi lain variabel untuk bahan pertimbangan dan dikembangkannya oleh para peneliti yang akan melanjutkan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, 39
Implementation Science 1 (2014).
<http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Dwika, S. A. P., Kismartini, K., & Dwimawanti, I. H. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Adiwerna Kabupaten Tegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 561–572. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.112>
- Elim, I., Saerang, D., & Toduho, D. (2014). Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 1090–1103. <https://doi.org/10.35794/emba.v2i2.4501>
- Fallis, A. . (2013). Teori Kebijakan Implementasi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e>. Bab 2 09417144028.pdf
- Fatmawatisyam, A. N. (2018). *Pengolahan Retribusi Pasar di Kecamatan Ponrang Kabupaten Lawu*. 5–24. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4304-Full_Text.pdf
- Heryana, A. (2020). *Ade Heryana, S.St, M.KM | Hipotesis dalam Penelitian Kuantitatif*. 1–16.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2016). *implementasi kebijakan*. 1–24. [http://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2790/3/BAB%20II.pdf)
- Inspirasi, J. (2019). *Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Er- Usip (Elektronik Retribusi Pasar) Di Dinas Perindagkop-Ukm Kabupaten Bangka Tengah Public Service Innovation Implementation Through Er-Usip (Elektronik Retribusi Pasar)*

at the Department of Perindagkop. 10, 115–120.
<http://inspirasi.bpsdm.jabarprov.go.id/index.php/inspirasi/article/view/76>

Izzaty, R. E., Astuti, B., & Cholimah, N. (1967). BAB III Metodologi Penelitian. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
[http://etheses.iainkediri.ac.id/1437/4/bab 3.pdf](http://etheses.iainkediri.ac.id/1437/4/bab%203.pdf)

Nur Hidayat, F., & Reza Pahlevi, D. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2010-2014. *Economics Development Analysis Journal*, 5(2), 123–134. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i2.22025>

peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Keempat atas Peraturan Deerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, (2020) (testimony of Perda).

Perwali nomor 28 tahun 2020 tentang sistem penerimaan dan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan derah pemerintah kota mojokerto, (2020) (testimony of Perda).

Rantetadung, R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2019). Evaluasi Efektivitas Penerimaan Pendapatan Retribusi Pasar Di Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Minahasa Tenggara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 187–193.
<https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22475.2019>

Rifai, Achmad, G. S. (2020). RETRIBUSI. *Kekuatan Hukum Lembaga Jaminan Fidusia Sebagai Hak Kebendaan*, 21(2).

Soniatin. (2021). Implementasi Permendagri NO. 2 tahun 2016 tentang KIA (Kartu Identitas Anak) di Dinas Kependudukan dan Pocatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
[http://repository.unim.ac.id/2981/3/BAB II.pdf](http://repository.unim.ac.id/2981/3/BAB%20II.pdf)

Sugiono. (2018). *METODE PENELITIAN KUNTITATIF* (M. P. setiyawami, S.H. (ed.); 1st ed.). alfabeta.

Sugiono. (2019). *metodologi penelitian kuantitatif kualotatif dan R&D* (mt dr.ir. sutopo. s.pd (ed.); dua). alfabeta.

- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Alfabeta.
<https://id1lib.org/book/5686376/9d6534>
- Syafie, I. K. (2015). *Bab II Landasan Teori Implementasi Kebijakan*. 13, 19–41.
<http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptummpg-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>
- Wahudmurni. (2017). *penerapan metodologi penelitian kuantitatif*. 93(I), 259.
<http://repository.uin-malang.ac.id/1985/2/1985.pdf>
- Wibawa, S. (2016). *Wibawa, Samodra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World , New Jersey: Princetown University Press. 19. 19–37.* <https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektif-model.pdf>
- Zulkardi. (2019). Penertiban Pedaganag Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota). *Skripsi*, 16–31. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9094/>